

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  
(STUDI KASUS: TAMPAT HIBURAN UMUM DI KECAMATAN TAMPAN)**

**ABSTRAK**

Oleh  
Purnomo

**Kata Kunci :** Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Indikator dari penelitian ini adalah Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja, Mengukur Kinerja, Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar, Mengambil Tindakan Perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Satpol PP adalah Servey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Kabid Penegakkan Perundang-undangan daerah, Kabid Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Personil Satpol PP Kota Pekanbaru. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi Pegawai Satpol PP dan teknik Purposive sampling untuk kelompok populasi Pemilik Hiburan, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satpol PP Kota Pekanbaru berada pada interval penilaian “Cukup Terlaksana” Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah dimana agar pelaksanaan tugas pengawasan satpol PP khususnya pada operasional hiburan umum lebih di tingkatkan lagi, agar pelanggaran yang dilakukan tidak terulang kedua kalinya.

***Analysis Of The Implementation Of The Satuan Police Passion Of Pamong  
Praja Kota Pekanbaru  
(Case Study: General Entertainment Views In Tampan District)***

**ABSTRAC**

**By**

**Purnomo**

**Keywords :** *Establish standards and methods for measuring performance, Measuring Performance, Comparing Performance in Accordance with Standards, Taking Corrective Measures*

*This study aims to determine the objective level of the Implementation of the Task Force for Supervision of Pekanbaru City Civil Service Police, the indicators of this study are Establishing standards and methods for measuring performance, Measuring Performance, Comparing Performance in Accordance with Standards, Taking Corrective Measures. The type of research located in the Satpol PP Office is a Descriptive Survey, which prioritizes the list of questionnaires as a means of collecting data and data collected with this tool and then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of the research objectives in the researched locations. The population used in this study is the Head of Pekanbaru City Civil Service Police Unit, Head of Regional Law Enforcement, Head of Community Operations and Order, Pekanbaru City Satpol PP personnel. The sampling technique used in setting individual samples is census techniques for the population of Satpol PP employees and purposive sampling techniques for the Entertainment Owner population group, the type and technique of data collection used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and data secondary collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use frequency table tools. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Analysis of the Supervision of the Pekanbaru City Satpol PP Supervisory Task Force was at the "Enough Enforced" assessment interval. The recommendations that needed to be considered were where the supervisory duties of Satpol PP especially in public entertainment operations were increased, so that violations were done not repeated a second time.*